

# TESIS

**KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI  
PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

*QUALITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AS MODERATING  
ADMINISTRATION INFLUENCE REGIONAL PROPERTY ON THE QUALITY  
OF FINANCIAL STATEMENTS*

**KARIM ABIDIN  
A042191012**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## **KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

*QUALITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AS MODERATING  
ADMINISTRATION INFLUENCE REGIONAL PROPERTY ON THE QUALITY  
OF FINANCIAL STATEMENTS*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**KARIM ABIDIN  
A042191012**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI  
PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

disusun dan diajukan oleh

**KARIM ABIDIN  
A042191012**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

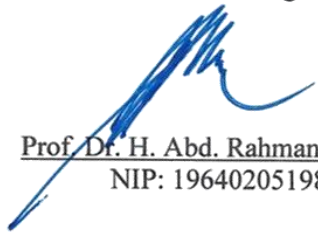
Pada tanggal 16 Agustus 2021

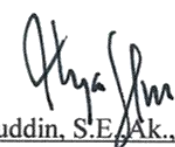
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


  
Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

  
Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin,

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karim Abidin

NIM : A042191012

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK BEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '66CDBAJX485148383' is printed.

Karim Abidin

## PRAKATA

*Bismillahirrohmanirrahim.*

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Proses penyelesaian tesis ini telah banyak melibatkan pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat serta saran yang sangat berarti kepada peneliti sehingga segala hambatan yang ditemui pada saat proses penyusunan tesis ini dapat diatasi oleh peneliti. Atas segala saran dan bantuan yang diberikan, dengan ketulusan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si dan Dr. Syamsuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister

Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

5. Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si, Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA, Dr. Hamrullah, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu tersayang Hj. Lawiyah, Ayah tercinta Bustan, kakak tercinta Halwi Bustan dan Adik tersayang Handika Bustan, Kakak Ipar Dyan Risanti Alfad dan Riswahyudi Ramli yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih pula kepada Wahyu Saputra, Egidia Triayu Tulak dan Asterius Budiarto sebagai sahabat yang telah ikut serta membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini dan para sahabat yang telah memberikan dukungannya yang selalu setia memberikan semangat A. Nurul Qalby Risal, Rully Octashegun serta keluarga dan sahabat yang tak sempat saya sebutkan satu per satu namanya. Semoga dengan segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada saya bisa bernilai ibadah di sisi-Nya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan peneliti terima dengan senang hati.

Makassar, Mei 2021

Karim Abidin

## ABSTRAK

**Karim** Kualitas Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadie dan Syamsuddin).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembukuan, inventarisasi, pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar serta menganalisis peran kualitas Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dan diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengurus Barang, serta Pembantu Pengurus Barang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software smartPLS 2.0*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar. Kualitas teknologi informasi sebagai pemoderasi pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, hanya dapat memoderasi inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar. Artinya kualitas teknologi informasi belum mendukung dalam melakukan inventarisasi yang akan mengakibatkan semakin berkualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sedangkan, kualitas teknologi informasi belum dapat memoderasi pengaruh pembukuan dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi terhadap pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota agar mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini yang dianggap dapat memberikan efek yang baik dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting karena dengan memahami faktor-faktor tersebut dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Kualitas Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

## ABSTRACT

**KARIM.** *The Quality of Information Technology as a Moderator of the Effect of Regional Owned Goods Administration on the Quality of Budget Report* (supervised by **Abd. Rahman Kadir** and **Syamsuddin**)

This research aims to examine and analyze the effect of bookkeeping, inventory, and reporting on the quality of budget report of Makassar City Government and analyze the role of the quality of information technology in moderating the effect of bookkeeping, inventory, and reporting on the quality of budget report of Makassar City Government.

This research was a quantitative study using primary data obtained from questionnaires given to budget administration officers, goods managers, and assistant goods managers. The sample was selected using purposive sampling technique. The data were analyzed using partial least square (PLS) approach with the help of smartPLS 2.0 software.

The results show that bookkeeping, inventory, and reporting have a significant effect on the quality of budget reports of Makassar City Government. The quality of information technology as a moderator of the effect of regional goods administration on the quality of budget reports viewed from bookkeeping, inventory, and reporting, can only moderate the inventory of the quality of budget reports of Makassar City Governments. This means that the quality of information technology has not supported the implementation of inventory to improve the quality of budget reports made by the local government. Meanwhile, the quality of information technology has not been able to moderate the effect of bookkeeping and reporting on the quality of budget reports of Makassar City Government.

Keywords: bookkeeping, inventory, reporting, quality of information technology, quality of budget reports





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Teori Stewardship .....	10
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan .....	11
2.1.3 Penatausahaan Aset Tetap.....	14
2.1.3.1 Pembukuan.....	15
2.1.3.2 Inventarisasi .....	16
2.1.3.3 Pelaporan.....	19
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	21

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .....	29
3.1 Kerangka Pemikiran.....	29
3.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis.....	30
3.2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
3.2.2 Pengembangan Hipotesisi .....	33
3.2.2.1 Pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.....	35
3.2.2.2 Pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.....	35
3.2.2.3 Pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.....	36
3.2.2.4 Kualitas teknologi informasi memoderasi pengaruh pembukuan, inventarisasi, pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN .....	38
4.1 Rancangan Penelitian.....	38
4.2 Situs dan Waktu Penelitian .....	38
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	40
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
4.6.1 Variabel Independen .....	40
4.6.2 Variabel Moderating .....	42
4.6.3 Variabel Dependen.....	42
4.7 Instrumen Penelitian .....	43
4.8 Teknik Analisis Data.....	43
4.9 Model Pengukuran atas Outer Model .....	45
4.10 Uji Asumsi Linearitas .....	45
4.11 Model Struktural atau Inner Model.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN .....	48
5.1 Deskripsi Data .....	48
5.2 Analisis Data .....	48

5.2.1 Statistik Deskriptif .....	49
5.2.2 Menilai Outer Model atau Measurement Model.....	51
5.2.2.1 Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Extracted (AVE).....	53
5.2.3 Pengujian Model Struktural (Inner Model).....	54
5.2.4 Pengujian Hipotesis.....	55
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
6.1 Pengaruh Pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar.....	60
6.2 Pengaruh Inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar.....	61
6.3 Pengaruh Pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar.....	63
6.4 Kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pembukuan, inventarisasi, pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar.....	64
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
7.1 Kesimpulan.....	67
7.2 Implikasi.....	69
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	69
7.4 Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Halaman
1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 sd Tahun 2018 .....	3
3.1 Penelitian Terdahulu .....	30
5.1 Deskripsi Data.....	48
5.2 Statistik Deskriptif .....	48
5.3 Outer Loading (Measurement Model).....	51
5.4 Hasil Uji Reliabilitas Konstruk .....	54
5.5 Hasil Estimasi R-Square.....	55
5.6 Result for Inner Weight.....	57
6.1 Ringkasan Hasil Pengujian.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Halaman
2.1 Kodefikasi Barang Inventaris.....	18
3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
5.1 Sebelum Memenuhi Converge Validity.....	53
5.2 Setelah Dimodifikasi untuk Memenuhi Converge Validity.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat dan harus memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010). Relevan antara lain memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Para pengelola keuangan yang ada di pemerintah daerah merupakan para manajer yang diharapkan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut

teori Stewardship (Donalson dan Davis, 1997) bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi. Pemerintah yang bertindak sebagai manager mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manager wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Adapun kriteria dalam pemberian opini : (1) **Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)** dimana auditor telah meyakini secara material bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan dan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.71/2010), Sistem pengendalian intern yang diterapkan telah cukup memadai sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, serta semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku. (2) **Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)**, dimana auditor telah meyakini secara material bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem pengendalian intern yang diterapkan telah cukup memadai

sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, serta semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku kecuali terhadap hal yang cukup material yang dikecualikan auditor tidak memperoleh keyakinan yang memadai. (3) **Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)** dimana auditor secara keseluruhan tidak setuju terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah meskipun sistem pengendalian intern yang diterapkan telah cukup memadai, dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, serta semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku, dan (4) **Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)** adalah kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat disebabkan karena: (a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, (b) auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan tersebut. Jadi tidak heran, jika setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh predikat tersebut, tidak terkecuali Pemerintah Kota Makassar. Opini laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Meskipun tren opini laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan adanya perbaikan dengan adanya raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun demikian masih terdapat beberapa temuan Badan Pemeriksaan Keuangan khususnya terkait dengan pengelolaan barang milik



daerah, baik yang ditemukan melalui pengujian aspek pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar secara menyeluruh, maupun temuan yang diperoleh melalui audit khusus pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 1.1  
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Makassar  
Tahun 2013 – Tahun 2018

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPKA Kota Makassar

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar masih banyak temuan terkait dengan penatausahaan aset tetap diantaranya masih banyaknya masalah inventarisasi terhadap barang milik daerah secara keseluruhan dan permasalahan status kepemilikan aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan opini WTP tidak serta merta berarti tidak ada masalah terkait dengan pengelolaan BMD. Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk menemukan bukti empiris hubungan antara penatausahaan BMD dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan perolehan opini WTP. Karena ternyata tren perolehan opini WTP

oleh Pemda belum secara signifikan menghapus banyaknya temuan-temuan terkait lemahnya penatausahaan BMD khususnya di Kota Makassar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi (2017), menunjukkan hasil bahwa penatausahaan aset tetap di Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan dan pencatatan barang milik daerah kedalam kartu inventaris barang secara langsung akan memudahkan untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu yang kemudian akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sementara penelitian yang dilakukan Febrianti (2016), menunjukkan hasil penelitian bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah akan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna/kuasa pengguna barang yang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), kemudahan akses ini secara langsung akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadi (2013), menunjukkan hasil penelitian bahwa penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung yang terdiri atas 3 komponen yaitu

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki pengaruh positif dan kontribusi sebesar 50,7% terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Andini dkk (2017) menemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Amaliah dkk (2019) juga menemukan bahwa penatausahaan barang milik negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Karena adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut, diduga terdapat faktor lain yang dapat menjelaskan kesenjangan yang terjadi yang akan memengaruhi pengaruh variabel penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel yang dimaksud adalah penerapan Teknologi Informasi.

Hasil penelitian Ratnaningsih & Suaryana (2014) menunjukkan bahwa kecanggihan dari aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Sehingga pada awal peluncurannya Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) telah dikembangkan sesuai dengan peraturan terkini, direncanakan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan terdapat kesinambungan pengembangan aplikasi. Keterkaitan antara sistem informasi aset dengan sistem informasi keuangan akan memberikan keuntungan dengan dapat dilakukannya *cek and balance* antara arus kas dan arus aset (Rahayu, et. al, 2014). Program aplikasi SIMDA-BMD digunakan untuk pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah (BPKP, 2015). Setiap sub sistem dari aplikasi menghasilkan output sebagai berikut:

- 1) Sub sistem perencanaan menghasilkan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
- 2) Sub sistem pengadaan menghasilkan Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
- 3) Sub sistem penatausahaan menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
- 4) Sub sistem penghapusan menghasilkan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
- 5) Sub sistem akuntansi menghasilkan Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extracomptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut untuk mengetahui keterkaitan penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan dengan penerapan SIMDA-BMD sebagai variabel moderasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Kualitas Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

- 1) Apakah pembukuan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
- 2) Apakah inventarisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
- 3) Apakah pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
- 4) Apakah kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
- 5) Apakah kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?
- 6) Apakah kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar?.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh pembukuan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar
- 2) Menganalisis pengaruh inventarisasi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

- 3) Menganalisis pengaruh pelaporan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar
- 4) Menganalisis peran kualitas Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar
- 5) Menganalisis peran kualitas Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar
- 6) Menganalisis peran kualitas Teknologi Informasi dalam memoderasi pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penulis yaitu mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penatausahaan aset tetap dan transparansi laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar
- 2) Bagi pemerintah kota Makassar yaitu sebagai informasi dalam hal penatausahaan aset tetap, penerapan sistem informasi dan penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan informasi keuangan daerah.
- 3) Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penatausahaan aset tetap, kualitas Teknologi Informasi dan kualitas laporan keuangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Stewardship**

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donalson dan Davis (1997) teori Stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manager atau steward dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hubungannya dengan teori stewardship yaitu informasi lebih berkualitas. Pemerintah yang bertindak sebagai manager mempunyai kewajiban menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manager wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori stewardship ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Jonas dan Blanchett (2000) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.



Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi

yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.1.3 Penatausahaan Aset Tetap**

“Tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja” (Yaser, 2010). Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penatausahaan aset tetap dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis

karena semua kebijakan lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan aset.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah.

#### **2.1.3.1. Pembukuan**

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah”. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan pencatatan semua aset tetap, mutasi, hasil inventarisasi ke dalam daftar barang dan kartu inventaris barang, melakukan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat dan hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap aset tetap hilang yang ditemukan kembali.

### **2.1.3.2. Inventarisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “inventarisasi berasal dari kata inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang yang dimiliki oleh individu maupun instansi”. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Menurut Sugiyama (2013:173), “inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah proses yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset atau barang beserta seluruh aspek legalnya.

Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi

dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Dalam kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

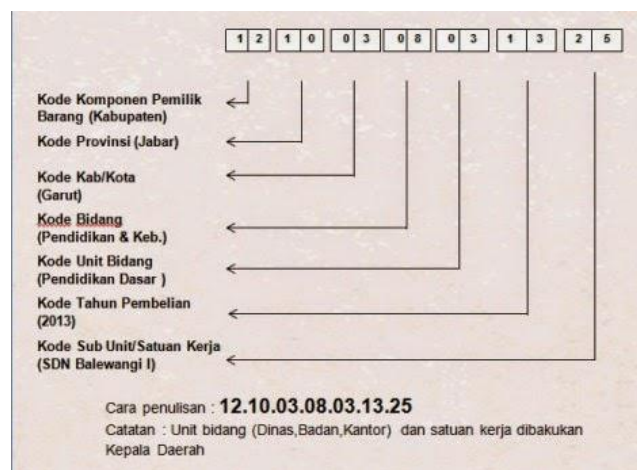
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016,

Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Inventarisasi digunakan untuk membuat sebuah daftar yang memuat semua aset atau barang yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset. Informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk dan harga perolehan dari aset. Inventarisasi juga memberikan informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah. Untuk memudahkan pencatatan dan pemahaman disetiap instansi pemerintahan, maka dibuatlah ketentuan inventarisasi barang yang berlaku secara nasional di Indonesia, ketentuan tersebut digunakan untuk mengisi Kartu Inventaris Barang disetiap instansi milik pemerintah yang memiliki begitu banyak aset. Ketentuan berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kodefikasi Barang Inventaris**

Dengan inventarisasi yang baik dan terintegrasi maka akan mengurangi hilangnya aset ataupun barang karena kelalaian maupun kesengajaan akibat lemahnya teknis pencatatan dan pengawasan terhadap setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi yang disertai dengan pencatatan seluruh aspek legal yang lengkap pun akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak diinginkan oleh pemilik, maka hal tersebut yang membuat tidak bisa dilepaskannya pencatatan aspek-aspek legal suatu aset disaat melakukan kegiatan inventarisasi.

### **2.1.3.3. Pelaporan**

Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016, “pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna”. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Pelaporan terdiri sebagai berikut:



1. Kuasa pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
4. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
6. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
7. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.
8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
11. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
12. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. Format Laporan Pengurus Barang :
  - a. Buku Inventaris.
  - b. Rekap Buku Inventaris.
  - c. Laporan Mutasi Barang.
  - d. Daftar Mutasi Barang.
  - e. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.
  - f. Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus.
  - g. Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan.

#### **2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk memperoleh, memproses dan menyimpan informasi yang berkualitas juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang

berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup:

- a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan pemerintah dan pemda berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan (Anggraeni, 2014).

## **BAB III**

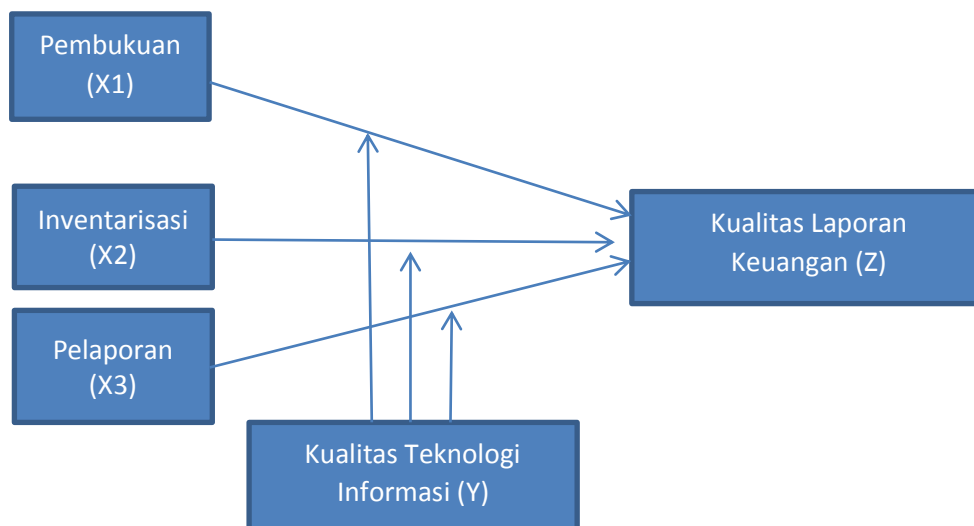
### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran dimana Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta Pembukuan, Inventarisasi dengan Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dimoderasi oleh Kualitas Teknologi Informasi.

*Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dengan pembukuan yang baik, dan melakukan inventarisasi serta didukung oleh teknologi informasi dengan didorong oleh pelaporan yang baik maka kualitas laporan keuangan akan baik. Penentuan tujuan seseorang dipengaruhi oleh dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas laporan keuangan. Variabel Kualitas Teknologi Informasi merupakan variabel moderating antara hubungan variabel pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedang yang dimaksud dengan variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki

kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

## 3.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

### 3.2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1  
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Lutfi Pauzi Fahmi (2017)	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: pembukuan,	Hasil penelitian menunjukkan elemen pembukuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,874, elemen inventarisasi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap kualitas

	Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran).	inventarisasi dan pelaporan	laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 0,226, elemen pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,779. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai F hitung sebesar 13,745.
Novira Juwita Andiani, Dini Wahyu Hapsari, Muhamad Muslih, (2017) ISSN: 2355-9357	Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Okta Dwi Kurnianto (2017)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dengan menggunakan software SPSS 23 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

<p>Yulpi Poae, Ventje Ilat Jessy D.L., Warongan (2017) Vol. 8. No. 1</p>	<p>Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan BMD berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian secara simultan perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.</p>
<p>Sukma Febrianti (2016) Vol. 10(1), 151-170</p>	<p>Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Pembukuan, Inventaris dan Pelaporan Aset Tetap</p>	<p>Pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pembukuan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel inventaris secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pelaporan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
<p>Ayang Putri Septiayu Anggraeni (2015)</p>	<p>Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo.</p>

	Probolinggo		
Anshari, Efrizal Syofyan (2012) ISSN: 2337-5345	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Inventarisasi BMD, Legal audit, Penilaian BMD, Pengendalian dan pengawasan Barang.	Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Oktaviana (2010)	Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK Di Kabupaten Tojo Una Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007	Variabel Dependen: Pengelolaan Aset Daerah Variabel Independen : Perencanaan, Penatausahaan, Peningkatan Produktivitas, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	Perencanaan, penatausahaan, Peningkatan produktivitas, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset daerah.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

### 3.2.2 Pengembangan Hipotesis

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada kegiatan pembukuan Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan



pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang dan dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Kemudian dilakukan proses pelaporan yaitu proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yusuf (2015:27) menjelaskan bahwa “neraca daerah yang merupakan bagian dari komponen laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya, jika penatausahaan aset tetap antara fisik aset, dokumen pemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian”. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut dan Kecanggihan dari aplikasi teknologi

informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi.

### **3.2.2.1 Pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.**

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Fauzi (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan elemen pembukuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan Novira dkk (2017) menemukan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian Sukma Febrianti (2016) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis penelitian ini:

H1: Terdapat pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

### **3.2.2.2 Pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar**

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Febrianti (2016) mengenai Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang

dilakukan Ayang Putri S (2015) dengan judul Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo dimana hasil penelitian menemukan secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

**3.2.2.3** Pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayung Putri S (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo dimana menemukan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Penelitian Sukma Febrianti (2016) mengenai Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menemukan bahwa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novira dkk (2017) mengenai Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) dimana menunjukkan bahwa pembukuan,

inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini:

H3: Terdapat pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

**3.2.2.4** Kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar

Penelitian yang dilakukan oleh Novira dkk (2017) dengan judul Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) dimana menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian Anshari (2012) mengenai Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang menemukan bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka hipotesis penelitan :

H4: Kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.

- H5: Kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.
- H6: Kualitas Teknologi Informasi memoderasi pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Makassar.